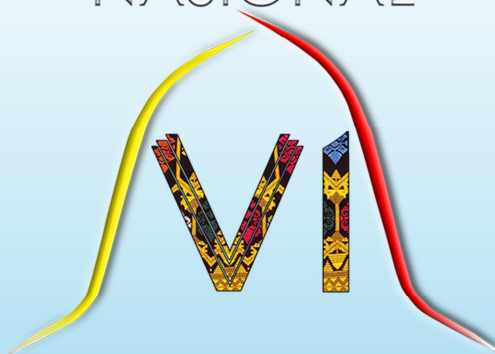




PROSIDING

KONVENSI NASIONAL



ASOSIASI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA

Tema:

**Kontribusi Studi HI Indonesia
dalam Menyambut
Masyarakat ASEAN 2015**

**24-28
November
2015**

**KAMPUS UNIVERSITAS MATARAM
HOTEL GOLDEN PALACE**

Sponsorship Konvensi VI AIHII:



SAMBUTAN

**KETUA ASOSIASI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA
2014-2017**

DALAM

**KONVENSI NASIONAL VI ASOSIASI ILMU HUBUNGAN
INTERNASIONAL INDONESIA 24 – 28 NOVEMBER 2015**

**“KONTRIBUSI STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL DALAM
MENYAMBUT MASYARAKAT ASEAN 2015”**

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas terselenggaranya Konvensi Nasional (Vennas) VI Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) di Lombok Mataram pada tanggal 24-28 November 2015.

Tanpa terasa perjalanan AIHII sebagai satu-satunya asosiasi yang menaungi program studi (prodi) Hubungan Internasional dan para staf pengajar/peneliti/pemerhati Hubungan Internasional Indonesia telah menginjak tahun keenam. Dalam kurun waktu ini, AIHII masih terus tumbuh dalam tahapan meletakkan landasan sebagai organisasi modern yang dikelola secara profesional.

Bila kita mengikuti dengan seksama, masing-masing konvensi yang dilaksanakan telah menjadi *milestones* bagi keberadaan AIHII hingga saat ini. Secara khusus, Vennas VI ini memiliki makna penting dan strategis karena akan berlakunya Masyarakat ASEAN 2015.

Dari niat untuk berkontribusi dalam perjalanan bangsa Indonesia, AIHII sebagai sebuah komunitas epistemik Hubungan Internasional Indonesia berupaya memberikan berbagai pemikiran dalam menyambut Masyarakat ASEAN 2015 yang secara resmi mulai berlaku pada 31 Desember 2015. Bahkan, beberapa hari yang lalu para pemimpin ASEAN menyepakati visi baru ASEAN paska 2015.

Dalam prosiding tercantum tiga puluh karya ilmiah dari para anggota AIHII yang membahas tentang kontribusi Hubungan Internasional menyambut Masyarakat ASEAN 2015 dan isu-isu lain yang berkembang dalam perspektif analisis Hubungan Internasional. Untuk itu, salah satu sumbangan penting dari Vennas VI ini adalah pemikiran tentang bagaimana studi Hubungan Internasional tetap relevan dalam Masyarakat ASEAN 2015.

Melanjutkan tradisi-tradisi yang baik dalam Vennas, pada Vennas VI kali pun tidak hanya berupa pertemuan ilmiah tetapi juga pertemuan organisasi yang akan menentukan masa depan AIHII sebagai sebuah organisasi profesi yang semakin profesional. Untuk itu, sebagai ketua AIHII saya mengajak kita semua untuk berpikir secara konstruktif menjadikan AIHII semakin kuat secara organisasi dan memberikan manfaat konkrit kepada para anggota dan masyarakat luas khususnya dalam memajukan Hubungan Internasional di Indonesia.

Saya berharap akan muncul terobosan inovatif dalam pengelolaan organisasi dan program kerja yang selama ini telah mulai dibangun dengan susah payah oleh para aktifis, ketua dan pengurus AIHII terdahulu. Beberapa agenda organisasi yang dapat dibahas antara lain adalah struktur organisasi, penyempurnaan AD/ART, KKNI, penerbitan jurnal asosiasi, program pertukaran mahasiswa, Lembaga Akreditasi Mandiri, Akreditasi, *resource sharing* diantara prodi di seluruh Indonesia dan program kerjasama penelitian dan publikasi bersama dan lain-lain.

Akhirnya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia beserta jajarannya yang telah menjadi mitra strategis AIHII selama ini, Universitas Mataram sebagai tuan rumah dan para panitia penyelenggara yang dipimpin Sdri Mala yang telah mempersiapkan segalanya dengan dukungan yang luar biasa. Saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada para pengelola program studi Hubungan Internasional seluruh Indonesia (anggota AIHII) serta individu yang berjasa, anggota SC dan OC sehingga Vennas VI ini dapat berlangsung dengan baik. Saya mohon maaf bila masih banyak terjadi kekurangan.

Selamat berkonvensi, selamat berkontribusi bagi kemajuan negeri!

Jakarta, 23 November 2015

Salam hangat,

Prof. Tirta N. Mursitama, PhD
Ketua AIHII 2014-2017

Daftar isi

Makalah Vennas VI AIHII

Kelompok I

1. **Kebijakan Luar Negeri Indonesia Di Masa Pemerintahan Jokowi Terkait Pelaksanaan Konektivitas ASEAN 2015.** (*Haiyyu Darman Moenir- Universitas Andalas, Padang*)
2. **Strategi Diplomasi Ekonomi Indonesia Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN.** (*Rizal A. Hidayat – Universitas Al-Azhar Indonesia*)
3. **Diplomasi Pertahanan Indonesia Pada Sengketa Laut Tiongkok Selatan: Strategi Enmeshing Terhadap External Power di ASEAN.**(*Denik Iswardani Witarti, AnggunPuspitasari, TulusYuniasih – Universitas Budi Luhur*)
4. **Diplomasi Total dan Masyarakat ASEAN 2015** (*Sukawarsini Djelantik – Universitas Katolik Parahyangan*)
5. **Agama dan Hubungan Internasional ASEAN: Islam dalam Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Krisis Kemanusiaan Rohingya.** (*AndiPurwono – Universitas Wahid Hasyim Semarang*)
6. **Moderate Islam, Pancasila, and ASEAN.** (*Nazaruddin Nasution – UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*)
7. **Meredakan Visi ke Indonesiaan Dalam Disiplin Hubungan Internasional Indonesia.** (*Andrew W. Mantong – Universitas Indonesia*)

Kelompok II

8. **Melawan Musuh Bersama: KerjaSama ASEAN dalam Menangani Kejahatan Peredaran Narkotika dan Obat Terlarang.** (*Adrianus Bintang Hanto Nugroho – Universitas Kristen SatyaWacana*)
9. **Kapitalisme VS Teori Hijau: Studi Kasus Asap Lintas-Batas Negara di Wilayah ASEAN.** (*RiskiBaskoro – Universitas President*)
10. **Terorisme dan Tantangan ASEAN *Political and Security Community* (APSC).** (*Gonda Yumitro – Universitas Muhammadiyah Malang*)
11. **ASEAN Regional Forum dan Kritik Kontra-Terorisme di Asia Tenggara.** (*Badrus Sholeh dan M. Adian Firas – UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta*)
12. **Kajian Gender dalam Kriminal: Keikutsertaan Perempuan dalam Bisnis Peredaran Narkoba di Indonesia Sebuah Studi Deskriptif Kuantitatif** (*Randhi Satria – Universitas Sebelas Maret Surakarta*)
13. **Islam Nusantara: Why Now? Sebuah Tinjauan terhadap Wacana Islam Nusantara sebagai Produk Pengetahuan dan Kekuasaan dan Relevansinya terhadap Kebijakan Indonesia di Asia Tenggara.** (*Witri Elvianti – Universitas President*)

14. **Kajian Komparatif Kerangka Keamanan Pangan Regional ASEAN dan Uni Eropa (2007-2014)** (Andre Ardi – Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama))
15. **Mengapa Identitas Kolektif Penting Bagi ASEAN? Strategi Riset Konstruktivis Dalam Menyediakan Rekomendasi Kebijakan Terkait Masalah Ketiadaan Peran ASEAN Dalam Isu Rohingya** (Mohamad Rosyidin – Universitas Diponegoro)
16. **ASEAN, China dan Stabilitas Kawasan** (Ignatius Ismanto – Universitas Pelita Harapan)
17. **Konflik Sosial Indonesia- Malaysia dan Potensi Pengaruhnya Terhadap Proses Pembangunan Integrasi Masyarakat ASEAN 2015** (Ruli Inayah Ramadhoan – Universitas Muhammadiyah Malang)
18. **Peran Media Dalam Pemberantasan Korupsi di Asia Tenggara** (Melisa Fransiska – UPH)

Kelompok III

19. **Corporate Social Responsibility (CSR): Mendorong Peran Strategis Kelompok Bisnis Dalam Penguatan Pilar Komunitas Sosial-Budaya ASEAN.** (*Nurullisnaeni, Asra Virgianita dan Shofwan Al-Banna Chaeruzard – Universitas Indonesia*)
20. **Politik Kesadaran sebagai Penentu Keberhasilan Pendekatan ASEAN Way Dalam Menyelesaikan Permasalahan Di Asia Tenggara.** (*FlavianusD.Melsasail – Universitas Kristen SatyaWacana*)
21. **Legalisasi Perjanjian Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015.**(*Imelda M.J. Sianipar – Universitas Kristen Indonesia*)
22. **“Beyond ASEAN Economic Community”: Meninjau Hubungan Perdagangan ASEAN dan Amerika Latin Sebagai Mitra Baru (Studi Kasus Indonesia terhadap Chile, Meksiko dan Peru).** (*Fredy B.L. Tobing, Asra Virgianita, Erwin Indrajaja, Maisa Yudono – Universitas Indonesia*)
23. **Free Flow of Labor in ASEAN Economic Community 2015: Indonesian Perspective.** (*Susi Tekunan-UniversitasPelitaHarapan*)
24. **Peran ASEAN University Network (AUN) Dalam Memajukan Kolaborasi Perguruan Tinggi Regional** (Ratih Indraswari – Universitas Katolik Parahyangan)
25. **Peran Perguruan Tinggi di ASEAN dalam Mensosialisasikan Masyarakat ASEAN 2015** (*DwiNurL.Fithriya & Harits Dwi W. – Universitas Respati Yogyakarta*)
26. **Peran Perguruan Tinggi Sebagai Agen Intelektual Dalam Mensosialisasikan Masyarakat ASEAN** (Diansari Solihah Amini – Universitas Respati, Yogyakarta)
27. **Analisa eksistensi dan kedaulatan Negara dalam dinamika hubungan Masyarakat Ekonomi ASEAN (Sebuah kajian berbasis *Complexity Theory*).** (*Tatok Djoko Sudiarto & Emil Radhiansyah – Universitas Paramadina, Jakarta*)

28. **Teori Hubungan Internasional Perspektif Indonesia Dalam Relasi Kuasa Pengetahuan Global dan Konstruksi Masyarakat ASEAN 2015** (Virtuous Setyaka – Universitas Andalas Padang)
29. **Norm Life Cycle : Kontribusi Konstruksivisme Dalam Pembentukan Identitas ASEAN Untuk Memperkuat ASEAN** (Yusron dan Afri Asnelly – Universitas Budi Luhur)
30. **Posisi ASEAN dan Diplomasi Indonesia Terkait Isu Palestina** (Dosen Jurusan Hubungan Internasional, FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

**DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA PADA SENGKETA LAUT
TIONGKOK SELATAN: STRATEGI ENMESHING TERHADAP EXTERNAL
POWER DI ASEAN**

Denik Iswardani Witarti, Ph.D

Anggun Puspitasari, M.Si

Tulus Yuniasih, M.Soc.Sc

This study discusses the Indonesian defense diplomacy related to the territorial dispute over South China Sea. As a non-claimant country, Indonesia should still put the conflict as her consideration in formulating her defense diplomacy strategy in order to maintain the peace and stability in the region. The dynamic of the conflict brought in the existence of ASEAN external powers that should then also be managed well. Therefore, this research aims to analyse Indonesian defense diplomacy strategy towards those external powers. The analysis process in this qualitative research is conducted under the concept of defense diplomacy. The results show that Indonesia implements enmeshing strategy towards external powers especially towards US and China. This strategy allows Indonesia to promote the anti 'intramural hegemony' by institutionalizing the main powers through ASEAN. This strategy also allows ASEAN member countries which include the claimant states that have less power than China to perform central role in the issue.

Keywords: Indonesia, defense diplomacy, South China Sea, territorial dispute, enmeshing strategy

Pendahuluan

Dewasa ini, kepentingan nasional sebagian besar bangsa-bangsa di dunia, yang secara spesifik dijabarkan oleh masing-masing negara ke dalam tujuan politik, ekonomi dan militer, sangat dipengaruhi oleh fenomena kemaritiman dunia. Hal ini menyangkut kepada fakta umum bahwa dua pertiga bagian dari permukaan bumi adalah lautan dan lebih dari 150 negara yang ada di dunia merupakan negara pantai dan atau negara kepulauan. Sedangkan fenomena kemaritiman dunia itu sendiri selalu berubah seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini

berdampak luas kepada upaya bangsa-bangsa di dunia dalam meningkatkan kekuatan dan keamanan teritorialnya. Konsekuensinya, strategi apapun yang dilakukan untuk melakukan upaya pertahanan dan keamanan negara, harus bertumpu kepada kekuatan maritim.⁵⁴

Hal tersebut selaras dengan pemikiran Alfred Thayer Mahan dalam bukunya *The Influence of Sea Power Upon History* yang menegaskan bahwa untuk menjadikan bangsa yang besar harus dapat menguasai kepentingan-kepentingannya di laut. Mahan mencatat, bahwa kejadian-kejadian di laut sangat mempengaruhi keadaan di darat. Namun umumnya keputusan-keputusan politik yang diambil berdasarkan kejadian-kejadian di darat, jarang mempertimbangkan aspek kemaritiman.⁵⁵ Doktrin Mahan ini kemudian menjadi tolak ukur pengembangan kekuatan maritim negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.

Dalam perkembangannya, Presiden Indonesia, Joko Widodo menegaskan mengenai visi maritimnya yaitu upaya Indonesia sebagai poros maritim dunia pada lembar Nawa Cita yang berisi program aksi dan pidato perdananya sesaat setelah ia disumpah sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019.⁵⁶ Dilihat dari unsur-unsur yang dimiliki Indonesia, visi Poros Maritim Dunia ini mungkin sekali akan terwujud. Namun, jika merujuk pada doktrin kekuatan maritim Mahan, masih terdapat beberapa syarat yang harus dicapai Indonesia untuk menjadi *maritime power*, dan kemudian Poros Maritim Dunia. Singkatnya, Indonesia harus mampu

⁵⁴ Chandra Motik Yusuf (ed.), (2008), *Maritime Dimensions Of A New World Order*, dalam Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim, Jakarta: IND HILL CO. Hal, 95.

⁵⁵ Alfred T, Mahan, (2014), *Discussion of the Elements of Sea Power and Geopolitics: An Introductory Reader*, New York: Cambridge. Hal, 25.

⁵⁶ Manurung, H, (2014), *Indonesia's Maritime Pivot and Joko Widodo (Jokowi) Transformational Leadership*, Available at SSRN 2510986.

menyelenggarakan tata tertib di laut atau menciptakan keamanan maritim yang merupakan salah satu prasyarat untuk dapat diakui sebagai Poros Maritim Dunia.⁵⁷

Salah satu permasalahan paling besar yang terkait dengan keamanan maritim di kawasan adalah konflik Laut Tiongkok Selatan. Dalam kurun waktu yang cukup lama negara-negara di kawasan Asia Tenggara terlibat sengketa yang rumit atas kepemilikan wilayah teritorial Laut Tiongkok Selatan. RRT, Vietnam, Brunei, Filipina dan Malaysia merupakan pihak yang terlibat langsung dalam sengketa klaim wilayah Laut Tiongkok Selatan. Wilayah Laut Tiongkok Selatan sendiri merupakan wilayah strategis baik dari sisi sumber daya alam, ekosistem maritim, maupun sebagai salah satu jalur transportasi utama minyak dunia. Konflik persengketaan wilayah ini telah berhasil menarik perhatian sebagai obyek perdebatan regional karena sampai saat ini belum juga tercapai kesepakatan diantara pihak-pihak terkait terhadap penyelesaian konflik. Permasalahan ini merupakan ancaman terbesar bagi stabilitas keamanan nasional Indonesia maupun keamanan kawasan yang selama ini sudah terjalin dengan baik diantara negara-negara dalam kawasan melalui kerjasama regional ASEAN.⁵⁸

Indonesia pada awalnya tidak terlibat, namun Indonesia mulai terusik oleh konflik kawasan karena pada tahun 1990-an Tiongkok menerbitkan peta unilateral, yang dikenal sebagai peta *U-Shaped* atau *nine dashed line*, dan memasukkan wilayah ZEE Indonesia di utara Kepulauan Natuna kedalam wilayah kedaulatan Tiongkok

⁵⁷ Willy F Sumakul, (2014), Poros Maritim dan ISPS Code Di Indonesia, *QUARTERDECK*, Vol. 8(2): 9.

⁵⁸ C.P.F Luhulima, (2011), *Dinamika Asia Tenggara menuju 2015*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal 345.

yang dengan ditandai sembilan garis putus-putus.⁵⁹ Hal ini tentu saja membangkitkan Indonesia untuk mempertahankan wilayah kedaulatannya dan mulai terlibat dalam pengelolaan sengketa Laut Tiongkok Selatan agar tidak bertambah buruk. Indonesia cepat merespon terhadap dinamika dan potensi konflik yang diwarnai dengan aksi militer dan melibatkan berbagai pihak di kawasan Asia Timur.⁶⁰ Karena perbedaan kepentingan dari berbagai pihak yang tidak dapat disinergikan dan dilanjutkan dengan aksi militer, maka akan membuat pertikaian berkelanjutan yang semakin rumit untuk diselesaikan secara damai.

Diplomasi Pertahanan Indonesia: *Planning Framework*

Diplomasi pertahanan adalah konsep yang dinyatakan Inggris melalui *Strategic Defence Review* pada tahun 1998, yang ditujukan untuk mengintegrasikan instrumen militer dan diplomatik terkait pencegahan konflik dan mengelola krisis.⁶¹ Terdapat beberapa definisi mengenai diplomasi pertahanan. Rajeswari Rajagopalan dalam jurnalnya yang berjudul “*Military Diplomacy: The Need for India to Effectively Use In Its Conduct of Diplomacy*” mendefinisikan diplomasi pertahanan “*categorized under such heads as defence exchanges to include joint training with the militaries of*

⁵⁹Gao, Z., & Jia, B. B, (2013), “The nine-dash line in the South China Sea: history, status, and implications”, *American Journal of International Law*, 107(1), 98-124.

⁶⁰ Ristian Atriandi Supriyanto, (2012), *Indonesia’s South China Sea Dilemma: Between Neutrality and Self Interest*, hal 10.

⁶¹ Centre Thucydide, (2003, 1 Januari), “AFRI 2002, Volume III – The “Defence Diplomacy”, Main Component of the Preventive Diplomacy. Toward a New Symbiosis Between Diplomacy and Defence,” <http://www.afri-ct.org/The-defence-diplomacy-main?lang=fr> diakses 5 September 2014.

foreign countries.”⁶² Sedangkan Matsuda Yasuhiro⁶³ dalam “*An Essay on China’s Military Diplomatic: Examination of Intentions in Foreign Strategy*” menyatakan diplomasi pertahanan sebagai, “*all diplomatic activities relating to national security and military diplomatic activities.*” Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa diplomasi pertahanan adalah kegiatan diplomatik berkaitan dengan keamanan nasional dan kegiatan militer yang meliputi pertukaran personil militer dan latihan bersama dalam rangka CBM dan memperkuat stabilitas kawasan.

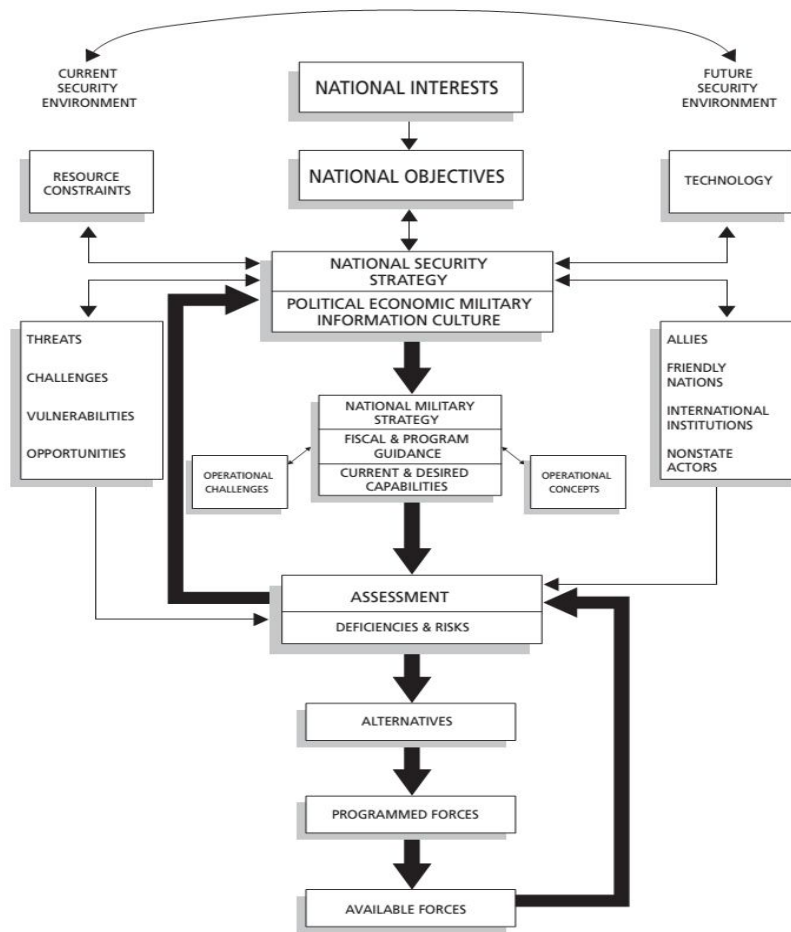
Pelaksanaan diplomasi pertahanan tidaklah berjalan sendirian, tetapi sinergi dengan kegiatan lainnya. Dengan ‘meminjam’ diagram Liotta-Lloyd posisi instrumen diplomasi berada dalam peta besar sebagai berikut:

Gambar 1

Strategy and Force Planning Framework

⁶² Rajeswari Pillai Rajagopalan, (2008), “*Military Diplomacy: The Need for India to Effectively Use In Its Conduct of Diplomacy*”, hal. 1.

⁶³ Matsuda Yasuhiro, (2006), “*An Essay on China’s Military Diplomatic: Examination of Intentions in Foreign Strategy*”, hal. 3.



Sumber: P. H. Liotta and Richmond M. Lloyd, (2005), “From Here To There: The Strategy and Force Planning Framework”, *Naval War College Review*, Vol. 58(2).

Diplomasi sebagai instrumen strategi keamanan nasional, harus bersinergi dengan instrumen lainnya membentuk satu kekuatan yang efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Peta tersebut mengisyaratkan bahwa instrumen operasionalnya tidak boleh bekerja sendirian, hindari tumpang tindih dan cegah tidak terjadi wilayah abu-abu.

Kebijakan diplomasi pertahanan telah dilaksanakan oleh Indonesia terus meningkat dalam satu dekade terakhir. Peningkatan diplomasi pertahanan dalam satu dekade terakhir sangat dipengaruhi oleh menguatnya kerjasama pertahanan antar negara guna merespon ancaman dan tantangan yang bersifat multidimensi. Namun, perkembangan demikian belum diikuti oleh kegiatan evaluasi kebijakan diplomasi pertahanan Indonesia terutama pada kondisi politik internasional kontemporer, dimana diplomasi pertahanan telah memainkan peran yang jauh lebih besar. Dalam konteks konflik Laut Tiongkok Selatan, Indonesia perlu terlibat dalam pengelolaan potensi konflik Selatan agar tidak ada dampak yang lebih buruk bagi kedaulatan maritim Indonesia maupun stabilitas kawasan.

Penguatan diplomasi pertahanan dan kerja sama maritim diharapkan dapat mendukung upaya untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan dengan mengambil peluang-peluang yang ada dari tiap ancaman yang mengemuka. Arsitektur keamanan regional yang sudah ada juga dapat dimanfaatkan untuk mendorong kerja sama keamanan maritim, khususnya dalam penanganan konflik Laut Tiongkok Selatan. Dalam lingkup ASEAN dan mitra dialognya, terdapat *ASEAN Regional Forum* (ARF), *ASEAN Defense Minister Meeting* (ADMM), *East Asia Summit* (EAS), maupun *ASEAN Maritime Forum* yang dapat diperkuat dan dioptimalkan untuk mendorong penanganan konflik dan stabilitas kawasan. Konflik Laut Tiongkok Selatan telah mendapat perhatian khusus dari kekuatan besar di luar kawasan, seperti Amerika Serikat. Indonesia terus mendorong sentralitas ASEAN dan peran aktif negara-negara di Asia Tenggara terhadap stabilitas kawasan agar tidak terjadi eskalasi konflik yang dapat melibatkan kekuatan militer dari luar kawasan.

Aktor Primer dan Keterlibatan *Eksternal Power* Dalam Konflik Laut Tiongkok Selatan

Aktor-aktor yang terlibat dalam sengketa ini antara lain negara-negara pengklaim dan negara non pengklaim yang mempunyai kepentingan di wilayah tersebut. Dalam perkembangan dinamika lingkungan strategis di Asia Pasifik, pihak-pihak yang terlibat sengketa di Laut Tiongkok Selatan kembali memanas seiring imbauan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton dalam ASEAN Post Ministerial Meeting di Hanoi pada Juli 2009 agar Tiongkok menyelesaikan sengketa di perairan itu secara damai dan tidak menggunakan cara-cara koersif dan ancaman.

Sengketa di Laut Tiongkok Selatan yang melibatkan enam negara secara langsung, yaitu Brunei, Tiongkok, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam terkait dengan klaim masing-masing pihak terhadap Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel. Secara tidak langsung, sengketa di perairan tersebut akan melibatkan pula pihak-pihak lain yang terkena *spill over*, seperti Amerika Serikat yang sangat menjunjung tinggi kebebasan bernavigasi. Dalam konteks itulah salah satu latar belakang keluarnya imbauan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton di Hanoi. Sehingga secara tidak langsung Amerika Serikat dan Tiongkok merupakan polaritas utama atau aktor utama pada konflik tersebut.

Konflik ini kemudian menjadi titik tumpu geopolitik di kawasan Asia Pasifik sedang menjadi suatu permasalahan internasional karena menyebabkan tersulutnya konflik antara sejumlah negara besar di Asia dan beberapa negara anggota ASEAN. Hingga akhir tahun lalu, sengketa wilayah Laut Tiongkok Selatan ini telah memberikan dampak yang cukup dramatis terhadap gelombang polarisasi kekuatan

negara-negara yang bertikai. Polarisasi ini terjadi antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Kedua negara tersebut sama-sama memiliki kepentingan terhadap Laut Tiongkok Selatan, keduanya saling berinteraksi dengan sekaligus membuat polarisasi di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara sebagai *regional power* harus dapat menentukan strategi bahkan sikap untuk memanfaatkan keadaan ini. Hal ini diperlukan agar negara-negara di kawasan Asia Tenggara dapat tetap menjalin kerjasama diantara keduanya tanpa terpengaruh oleh polarisasi yang diciptakan Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan tersebut.

Konflik di Laut Tiongkok Selatan dipastikan akan menimbulkan dampak yang signifikan terhadap stabilitas kawasan Asia Pasifik, karena pihak-pihak yang berhadapan merupakan kekuatan besar di kawasan. Dinamika di Laut Tiongkok Selatan saat ini menunjukkan kecenderungan sulitnya mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan di perairan tersebut, baik negara-negara pengklaim maupun negara pengguna perairan itu. Oleh sebab itu, Indonesia sebagai negara yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki kepentingan di Laut Tiongkok Selatan sejak dini harus mempunyai strategi nasional untuk mengantisipasi eskalasi konflik. Indonesia meskipun bukan merupakan negara yang turut mengklaim di Laut Tiongkok Selatan, tetap mempunyai kepentingan di perairan itu. Kepentingan tersebut setidaknya ada dua, yaitu mencegah spill over ke wilayah kedaulatannya dan memperkuat klaim wilayah ZEE Indonesia di Laut Tiongkok Selatan yang berbatasan dengan Laut Natuna. Seperti diketahui, dalam peta yang diterbitkan oleh Tiongkok pada 1992 klaim Tiongkok sampai merambah ke wilayah ZEE Indonesia yang ditandai dengan adanya sembilan garis putus-putus.

Dinamika Pola Hubungan Amerika Serikat – Tiongkok dalam Konflik LTS

Isu politik dan keamanan di Laut Tiongkok Selatan tidak dapat dilepaskan dari bingkai persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, meskipun Amerika Serikat bukan negara yang mengklaim wilayah di perairan tersebut. Tentu menjadi pertanyaan mengapa Amerika Serikat berkepentingan dengan Laut Tiongkok Selatan? Strategi Keamanan Nasional Amerika Serikat yang ditandatangani oleh Presiden Barack Obama dan diterbitkan pada Februari 2010 menyatakan bahwa *“Our national security strategy is, therefore, focused on renewing American leadership so that we can more effectively advance our interests in the 21st century”*. Himbauan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton dalam pertemuan ASEAN di Hanoi berada dalam bingkai tersebut, yang apabila diturunkan pada tingkat mikro akan terkait dengan kebebasan bernavigasi bagi kapal perang Amerika Serikat.

Amerika memiliki kebijakan Luar Negeri tersendiri dalam keterlibatannya di konflik Laut Tiongkok Selatan, dimana Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat ini disampaikan oleh US State Departement Spokesperson yang mencakup 5 elemen yakni :

1. *Peaceful Resolution of the Disputes* : *“The United States strongly opposes the use or threat of force to resolve competing claims and urges all claimants to exercise restraint and avoid destabilizing actions”*
2. *Peace and Stability* : *“The United States has abiding interest in maintenance of peace and stability in the South China Sea”*

3. *Freedom of Navigation* : “Maintaining freedom of navigation is a fundamental interest of US. Unhindered navigation by all ships and aircraft in the South China Sea is essential for the peace and prosperity of the entire Asia-Pacific region, including the US.
4. *Neutrality in disputes* : “The United States takes no position on the legal merits of the competing claims to sovereignty over the various island, reefs, atolls, and cays in the South China Sea”
5. *Respect of International principles* : “The US would, however, view with serious concern any maritime claim or restriction on maritime activity in the South China Sea that was not consistent with international law including the 1982 UNCLOS.”⁶⁴

Sebagai pihak yang diminta untuk turut aktif dalam penyelesaian konflik ini, Amerika Serikat yang telah memulai strategi militer "poros" menuju Asia, Amerika Serikat telah menyatakan niatnya untuk membuat "poros" gerakan - pergeseran kekuatan dan strategi mereka ke Asia, dan konflik ini menempatkan banyak tekanan pada kekuatan ekonomi yang muncul. Vietnam dan Filipina telah meminta Amerika Serikat untuk meningkatkan kehadirannya dalam rangka untuk mengimbangi naiknya kekuatan Tiongkok. Vietnam dan Filipina bahkan meningkatkan dua kali lipat anggaran pertahanan pada tahun 2014 dan dianggap sebagai rencana latihan militer gabungan lima tahun dengan Amerika Serikat Meskipun ada tekanan dari beberapa

⁶⁴ Fravel, T, (2012), *South China Sea : What Issue and Whose Core Interest* , 6th Berlin Conference on Asia Security, Berlin: Konrad Adenauer Stiftung.

negara Asia untuk kehadiran lebih Amerika Serikat. Negara-negara lain percaya bahwa Amerika Serikat harus mengurangi pengaruh mereka di wilayah tersebut.

Persaingan kedua negara ini juga tampak dalam usahanya menyebarkan pengaruh di kawasan Asia Tenggara. Tiongkok telah memiliki peluang untuk menyebarkan pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara dikarenakan kedekatannya baik secara geografi maupun dengan berbagai kerjasama yang dilakukan dengan kawasan ini. Untuk itu, konflik Laut Tiongkok Selatan ini dipandang Amerika Serikat sebagai pintu masuk untuk menyebarkan pengaruhnya di Asia Tenggara, peluang Amerika Serikat ini pertama muncul karena sengketa ini kemudian menimbulkan hubungan yang kurang baik antara Tiongkok dan negara Asia Tenggara seperti Vietnam dan Filipina. Selain itu dengan diundang turut campur dalam konflik ini, Amerika Serikat dapat memanfaatkannya. Dalam rangka memperkuat relasi keamanan, ikatan pertahanan dan membentuk aliansi serta memperoleh dukungan dari kawasan Asia Tenggara.

Amerika Serikat bahkan mendapat dukungan dari negara ASEAN lainnya yang tidak berkonflik untuk turut serta dalam penyelesaian konflik Laut Tiongkok Selatan, dukungan ini didapat dari beberapa negara seperti Indonesia. Sayangnya keberadaan Amerika dalam konflik laut Tiongkok Selatan ini belum juga dapat membantu menyelesaikan konflik.

Adanya aktor eksternal dalam hal ini Amerika menyebabkan kepentingan yang ada didalam konflik ini semakin meluas. Amerika Serikat dengan strategi militer porosnya memiliki kepentingan tersendiri untuk menunjukkan dominasinya di kawasan Asia Tenggara. Hal ini juga menghambat proses mediasi yang terjadi dalam

konflik Laut Tiongkok Selatan. Karena kepentingan Amerika Serikat yang utama bukan hanya penyelesaian konflik Laut Tiongkok Selatan. Selain itu sikap Tiongkok yang berubah semakin agresif dalam menghadapi konflik ini dengan meningkatkan kapabilitas militernya khususnya sejak masuknya Amerika Serikat dalam konflik ini. Bahkan kerjasama dan pelatihan militer yang dilakukan Amerika Serikat dengan Filipina dapat meningkatkan tingkat eskalasi konflik karena dapat menimbulkan kecurigaan dan ketegangan negara lain yang terlibat konflik di kawasan Laut Tiongkok Selatan.

Secara tidak langsung Amerika Serikat dan Tiongkok telah berupaya untuk saling menyebarkan pengaruh di kawasan (*Balance of Influence*). Oleh karena itu, sikap terbaik yang seharusnya dilakukan oleh negara-negara Asia Tenggara adalah dengan melakukan *hedging*. Hal ini seperti ditegaskan Goh dalam tulisannya yang berjudul *Understanding 'Hedging' in Asia-Pacific Security*, menjelaskan strategi *hedging* sebagai:

*"a set of strategies aimed at avoiding (or planning for contingencies in) a situation in which states cannot decide upon more straightforward alternatives such as balancing, bandwagoning, or neutrality. Instead they cultivates a middle position that forestalls or avoids having to choose one side [or one straightforward policy stance] at the obvious expense of another"*⁶⁵

⁶⁵ Evelyn Goh, (2006) *Understanding "hedging" in Asia-Pacific Security*, Working paper yang diajukan pada Pacific Forum CSIS, Honolulu, Hawai pada tanggal 31 Agustus. Hal 1.

Sebuah negara yang dapat melakukan hedging (*hedger*) secara kuat adalah negara yang mampu membangun dan mempertahankan hubungan strategis secara dekat dengan dua kekuatan besar pada saat yang bersamaan.⁶⁶ Dalam hal ini, selanjutnya perilaku *hedging* meliputi 'omni-enmeshment' dari sejumlah kekuatan utama di kawasan yang bertujuan untuk mendorong sebuah struktur hierarkis keamanan yang dapat meningkatkan stabilitas regional.⁶⁷ Terdapat dua level dalam kebijakan *Omni-Enmeshment*. Pertama adalah Omni-Enmeshment skala kecil, dalam level ini fokus kerjasama lebih diarahkan pada segi "*security intraregional*" di mana satu negara melakukan kerjasama strategis dengan beberapa "*major power*". Kedua adalah *Omni-Enmeshment* skala berkembang, dalam skala ini ,pengambil kebijakan mencoba untuk merubah realitas geopolitik yang dimiliki oleh kekuatan besar untuk kepentingan mereka sendiri. Artinya negara-negara tersebut memperluas relasi hubungan bilateral untuk mengatur stabilitas regional. Tujuan dan objek enmeshment berbeda-beda di tiap negara, salah satunya adalah keinginan untuk meningkatkan regional leadership, dan ambisi untuk mengubah great power behavior. Omni-enmeshment berfungsi dalam 3 cara, melalui pencantuman legitimasi, yang kedua adalah hubungan institusionalisasi, yang ketiga adalah kerjasama keamanan.⁶⁸

Tujuan dari strategi *hedging* yang berupa *great power enmeshment* ini tidak untuk menghasilkan *a multipolar balance of power* dalam pengertian yang konvensional, karena negara-negara besar yang terlibat disini tidak berada di

⁶⁶ *Ibid*, hal 5.

⁶⁷ Evelyn Goh, (2005), *Meeting the China Challenge: The U.S. in Southeast Asia Regional Security Strategies*, Washington: East West Center. Hal 7.

⁶⁸ Evelyn Goh, (2008), "Hierarchy and the role of the United States in the East Asian Security Order". *International Relations of the Asia-Pacific*. Vol. 8(3): 99.

perserikatan yang sama. Strategi hedging bertujuan untuk memfasilitasi sebuah transisi yang pada dasarnya tidak mengganggu distribusi kekuatan di kawasan.⁶⁹ Tujuan ini berbeda dengan strategi *balancing* atau *bandwagoning* yang bertujuan untuk mencegah transisi kekuasaan atau untuk mencapai hasil revisionis dalam distribusi kekuasaan. Idealnya diharapkan bahwa akan tercipta stabilitas yang lebih baik pada tatanan global. Tentu saja, negara-negara besar akan saling mengawasi satu sama lain dan bertindak sebagai deterrent dengan berani. Dalam pengertian ini, *enmeshment* merupakan *hedging* terhadap kemungkinan persaingan kekerasan antara kekuasaan besar di kawasan dan agresi kekuatan besar terhadap negara-negara yang lebih kecil.⁷⁰

Terdapat kekhawatiran akan terjadinya ketidakstabilan sistem multipolar di kawasan tersebut oleh negara-negara kecil dan menengah dikarenakan adanya persaingan kepentingan antara negara hegemon (Tiongkok) dan *balancer* (Amerika Serikat) di dalam kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu negara-negara kecil di kawasan Asia Tenggara seharusnya menggunakan strategi *hedging* sebab tidak memungkinkan untuk menggunakan strategi *balancing* dan *bandwagoning* secara murni dengan negara-negara kuat. Namun, yang terjadi saat ini adalah negara-negara Asia Tenggara terutama Indonesia belum secara tegas menentukan strateginya. Hal ini kan menimbulkan kesan *bandwagon* ke segala pihak, baik ke negara hegemon

⁶⁹ Capie, D. (2005) 'Southeast Asia and the United States', dalam Evelyn Goh (ed), *Between and Between: Southeast Asian Strategic Relations with the U.S. and China*, Singapore: Institute of Defence and Strategic Studies, hal. 29.

⁷⁰ Evan S. Medeiros, (2006), "Strategic Hedging and the Future of Asia-Pacific Stability," *Washington Quarterly*, Vol 29(1): 8.

maupun *balancer*.⁷¹ Hal ini tentunya akan menyulitkan negara-negara Asia Tenggara terutama Indonesia karena harus mengakomodir semua kepentingan Tiongkok dan Amerika Serikat yang bertentangan.

Diplomasi Pertahanan Indonesia di Laut Tiongkok Selatan

Sebagai penguatan dalam diplomasi pertahanan untuk mendukung pemeliharaan stabilitas kawasan, modalitas yang harus dimiliki Indonesia harus meliputi dua lingkup. *Pertama*, kualitas diplomasi. Kualitas diplomasi merupakan salah satu faktor penting dari *national power* yang dimiliki negara. Kualitas diplomasi dilihat melalui bagaimana negara dapat menggabungkan faktor-faktor yang berlainan menjadi suatu keseluruhan terpadu, memberikan arah dan bobot serta dapat memaksimalkan dari kapabilitas yang dimiliki.⁷² Selain itu, diplomasi dapat dikatakan berkualitas apabila suatu negara dapat berperan dan memiliki inisiatif di dalam forum internasional terkait penyelesaian masalah. Asumsinya, semakin berkualitas diplomasi yang dimiliki, semakin besar pula kesempatan yang dimiliki negara untuk mencapai tujuannya. *Kedua*, kapabilitas militer. Kapabilitas militer merupakan instrumen penting untuk mendukung kebijakan luar negeri suatu negara.⁷³ Adapun penilaian dari kapabilitas militer dapat dilihat melalui beberapa hal, yaitu teknologi militer, kepemimpinan militer, dan kuantitas dan kualitas angkatan bersenjata.

⁷¹ Wawancara dengan Laksda TNI (Purn) Robert Mangindaan, Ketua Forum Kajian Pertahanan dan Maritim (FKPM), 6 Agustus 2015.

⁷² Hans J. Morgenthau, (2010), *Politik Antar Bangsa*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hal. 169.

⁷³ Juanita elias & Peter Sutch, (2007), *The Basics International Relations*, New York: Routledge: p. 109.

Disamping itu, faktor penting terkait dengan diplomasi adalah dukungan. Adapun dukungan tidak hanya dari domestik (legislatif dan publik), melainkan juga dukungan dari negara lain. Idealnya kebijakan luar negeri tidak hanya ditempuh melalui “senjata tradisional” yaitu diplomasi dan militer, tetapi juga menggunakan “senjata lain” yaitu propaganda.⁷⁴ Karena, perebutan *power* di lingkungan internasional tidak hanya perebutan keunggulan militer dan dominasi politik, melainkan juga perebutan pemikiran manusia. Jadi, *power* negara tidak hanya tergantung pada keterampilan diplomasi dan kekuatan angkatan bersenjata, tetapi juga bagaimana suatu negara bisa mendapatkan dukungan dari negara lain terhadap kebijakan yang dibuat.

Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam ASEAN terkait LTS: Strategi Enmeshing terhadap Eksternal dan Regional Power

Modalitas yang dimiliki Indonesia dalam penguatan diplomasi pertahanan dalam rangka mendukung pemeliharaan stabilitas kawasan terlihat dari kualitas diplomasi yang dimilikinya. Kualitas diplomasi yang dimiliki Indonesia terlihat dari peran aktif dan inisiatif yang diberikan Indonesia dalam forum multilateral, bilateral, dan *second track*. Adapun forum tersebut meliputi ASEAN: ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN Defence Ministerial Meeting (ADMM), East Asia Summit (EAS) dan ASEAN Maritime Forum. Selain itu, peran aktif Indonesia juga terlihat dari inisiatifnya dalam mendorong terbentuknya mekanisme dalam mengelola konflik di Laut Tiongkok Selatan melalui implementasi DOC dan proses pembentukan COC.

⁷⁴ *Ibid.*, hal. 180.

Perkembangan dari draft COC berlanjut melalui pertemuan *intra-ASEAN* dalam *Working Group* tahun 2012 dimana menghasilkan draft dari prinsip COC. Namun isu ini ditolak untuk dibahas oleh Kamboja. Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa menyatakan, “*I think it is utterly irresponsible if we cannot come up with a common statement on the South China Sea.*”⁷⁵ Marty kemudian menyelesaikan permasalahan *disunity* dengan melakukan kunjungan bilateral (dikenal dengan istilah *shuttle diplomacy*) ke Kamboja, Vietnam, dan Filipina untuk menyatukan posisi negara anggota ASEAN terkait Laut Tiongkok Selatan. Selanjutnya Indonesia membuat ‘*six-point plan*’ yang dipublikasikan pada Juli 2012.

Indonesia dan Filipina bertemu dan sepakat pada proposal *six-point* lalu mengajukannya ke anggota negara ASEAN. Setelah itu, Indonesia menginformasikan proposal tersebut kepada Kamboja yang ketika itu menjabat sebagai Ketua ASEAN. selanjutnya, Kamboja menerbitkan *ASEAN’s Six-Point Principles on the South China Sea*. Adapun isi dari poin tersebut meliputi: 1) implementasi DOC, 2) pedoman implementasi DOC, 3) konklusi COC di Laut Tiongkok Selatan, 4) penghormatan terhadap prinsip UNCLOS 1982, 5) *self-restraint* dan *non-use of force*, dan 6) resolusi damai terhadap sengketa berdasarkan prinsip UNCLOS. Terdapat dua *output* dari hasil pertemuan tersebut, yaitu 1) Semua negara anggota ASEAN menyetujui prinsip *ASEAN Common Position* dalam Laut Tiongkok Selatan, terkait komitmen terhadap DOC dan 2) Tiongkok bersedia untuk bekerja sama dengan ASEAN untuk

⁷⁵ *Agence France Presse*, (12 Juli 2012), “ASEAN Struggles for Unity over South China Sea,” dalam Gary Collinson & Christopher B. Roberts, (2013), *The Role of ASEAN*, Acton: Australian National University, hal. 38

mengimplementasikan DOC dan “atas dasar konsensus” mewujudkan COC. Dapat dikatakan bahwa diplomasi Indonesia berperan dalam menyatukan anggota ASEAN.

Kualitas dari diplomasi yang dimiliki Indonesia juga terlihat dalam inisiatifnya pada pertemuan AMM ke-45. Indonesia yang diwakili Menlu Marty menyatakan, “*Indonesia will circulate a non paper [on] possible and additional elements of [the] COC. It is meant to be more prescriptive and operational.*”⁷⁶ Indonesia juga menerbitkan “*non-paper*” kepada menteri luar negeri negara anggota ASEAN dalam pertemuan di New York. Proposal yang dikeluarkan Indonesia berjudul, “*Zero Draft A Regional Code of Conduct in the South China Sea.*”⁷⁷ Dokumen ini berdasarkan dari 3 sumber: DOC tahun 2002, Proposal ASEAN dalam *Code of Conduct*, dan Prinsip Enam-Poin ASEAN dalam Laut Tiongkok Selatan. Kontribusi Indonesia yang paling signifikan dalam dokumen ini ada pada Pasal 6 terkait implementasi COC.⁷⁸

Pasal 6 menjelaskan tentang aturan, norma, dan prosedur terkait CBM. Selain itu, terdapat juga isi mengenai pencegahan kecelakaan dan tabrakan di laut yang diambil dari *Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea* (COLREGS) tahun 1972. Di Pasal 8, Indonesia memasukkan mekanisme sengketa yang terdapat dalam *ASEAN Proposed Elements of a Regional Code of Conduct* dan *ASEAN Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (yang mana

⁷⁶ Carlyle A. Thayer, (2010), *The United States and Chinese Assertiveness in the South China Sea*, Vol. 6. hal. 7-8.

⁷⁷ *Ibid.*,

⁷⁸ *Ibid.*,

Tiongkok juga turut menandatangani).⁷⁹ Sementara itu, sebagai negara diluar kawasan yang memiliki kepentingan di Laut Tiongkok Selatan, Amerika Serikat mengharapkan COC dapat menjadi wadah penyelesaian sengketa. Namun, Amerika Serikat tidak dapat banyak berperan karena Tiongkok mempersepsikan AS sebagai kompetitor, sehingga Indonesia dapat berperan lebih besar dalam mempromosikan dan mendorong terbentuknya COC. Dapat dikatakan bahwa peran dan inisiatif diplomasi Indonesia membuat Tiongkok kini menghadapi ASEAN yang lebih bersatu.

Tahun 2013 dan 2014 menjadi tahun penting dalam perkembangan kerjasama maritim antara ASEAN dan Tiongkok. Hal ini terlihat dari hasil dan potensi yang telah didiskusikan oleh kedua pihak dalam beberapa kesempatan. Pada tahun 2013 Tiongkok sepakat untuk mendiskusikan CoC. Selain itu, dalam ASEAN-China Senior Officials' Meeting on the Implementation of the Declaration of Conduct in the South China Sea (SOM on DoC) ke-7 dan ASEAN-China Senior Officials' Consultation (ACSOC) ke-20 di Thailand pada April 2014, kedua pihak menekankan pentingnya mengimplementasikan DoC secara menyeluruh dan efektif.⁸⁰ Implementasi bukan hanya mencakup aktivitas pembangunan kepercayaan berbasis proyek, namun juga termasuk pengamalan prinsip dan norma dalam DoC. Disamping itu, kedua pihak juga mendiskusikan potensi penandatanganan *ASEAN-China treaty on good neighbourliness and friendly cooperation*, yang sebagian besarnya menekankan pembangunan pada dimensi ekonomi, meskipun juga termasuk kerjasama maritim.

⁷⁹ *Ibid.*,

⁸⁰ *Ibid.*

Disamping diplomasi multilateral dan bilateral, Indonesia juga menginisiasi pada *second track. Workshop* yang diberi nama *Managing Potential Conflicts in the South China Sea* pada tahun 1990.⁸¹ Tawaran yang diberikan oleh *workshop* ini adalah bukan membahas tentang penyelesaian sengketa, tetapi merencanakan program kerjasama, mempromosikan dialog dan mengembangkan CBMs.⁸² Intinya adalah ‘mengelola’ dibandingkan ‘menyelesaikan’ konflik. Pencapaian dari *workshop* yang diinisiasi Indonesia adalah ini adalah negara-negara pengklaim maupun bukan pengklaim memahami posisi dari masing-masing negara.

Pada sisi lain, salah satu faktor keberhasilan diplomasi adalah dukungan dari entitas domestik. Permasalahannya adalah diplomasi Indonesia di dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan tidak populer di kalangan publik domestik. Bahkan, dari hasil survei yang dilakukan oleh *Centre for Chinese Studies-Indonesia* tahun 2014 dengan 1,096 responden di 15 kota besar di Indonesia, ketika ditanya tentang isu sengketa di Laut Tiongkok Selatan. Hanya 12 persen yang mengetahui isunya.⁸³ Mayoritas dari populasi di Indonesia (khususnya di kota besar) tidak mengerti permasalahan di Laut Tiongkok Selatan apalagi diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam rangka mengurangi tensi konflik yang ada.

Namun, terlepas dari semua kendala yang dihadapi, Indonesia telah mampu melaksanakan Diplomasi pertahanan di ASEAN dengan menggunakan strategi *hedging* dalam bentuk *enmeshing* negara-negara besar yaitu Tiongkok dan Amerika

⁸¹ (David Scott, 1023-4).

⁸² Gary Collinson & Christopher B. Roberts, *Op. Cit.* hal. 52.

⁸³ Rene L. Pattiradjawane, (2015), *South China Sea Disputes: Sovereignty and Indonesian Foreign Policy*, Singapore: RSIS.

Serikat. Pemerintah Indonesia telah menggunakan lembaga-lembaga seperti ASEAN dan ARF untuk menjaga Amerika Serikat dan Tiongkok agar secara konstruktif terlibat di wilayah ini demi mempromosikan prinsip-prinsip anti “hegemoni intramural” yang mengancam negara-negara regional.⁸⁴ Dalam hal ini, Indonesia berusaha untuk 'melembagakan kekuatan-kekuatan utama'. Pelembagaan melalui ASEAN dapat membantu negara-negara Asia Tenggara khususnya Indonesia dalam menyeimbangkan pengaruh kekuatan-kekuatan utama tersebut.⁸⁵ Pelembagaan ini juga membantu negara-negara anggota ASEAN mendapatkan peran-peran sentral dalam lingkungan strategis dikawasan Asia Tenggara. Peran sentral tersebut digunakan demi menjalin hubungan asosiatif dengan para *external power* yang terlibat dalam konflik laut tiongkok selatan yaitu Amerika Serikat dan Tiongkok.

Kesimpulan

Sengketa di wilayah Laut Tiongkok Selatan wujud sebagai salah satu potensi ancaman bagi Indonesia dalam mencapai visi yang melibatkan unsur kemaritiman ini. Indonesia memang tidak terlibat langsung dalam konflik yang melibatkan lima negara tetangga yang bersama-sama Indonesia berada di kawasan Asia Timur (Asia Timur Jauh dan Asia Tenggara). Namun, lokasi geografis yang sangat dekat dengan teritori kedaulatan Indonesia perlu mendapat perhatian besar. Dalam tumpang tindih kepentingan kekuatan besar kawasan, Indonesia nampaknya harus dapat

⁸⁴ John David Ciorciari, (2009), “The Balance of Great-Power Influence in Contemporary Southeast Asia”, *International Relations of the Asia-Pacific*, 9(1): 177.

⁸⁵ Evelyn Goh, (2008), “Great Powers and Hierarchical Order in Southeast Asia: Analyzing Regional Security Strategies”, *International Security*, 32(3):144.

memanfaatkan ASEAN dan ARF untuk bertahan pada sisi stabilitas kawasan. selain itu Indonesia harus bersikap *hedging* dalam bentuk strategi *enmeshing* agar tidak terpengaruh kedalam polarisasi kedua negara besar yang terlibat dalam konflik Laut Tiongkok Selatan, yaitu Amerika Serikat dan Tiongkok. Namun hendaknya kembali dipahami bahwa upaya ASEAN selama ini untuk mencari solusi damai atas sengketa di Laut Tiongkok Selatan sesungguhnya merupakan pendekatan informal, sebab Tiongkok menolak penggunaan pendekatan formal berlatar multilateral. Oleh karena itu, sifat-sifat pendekatan yang kooperatif melalui jalur diplomasi harus tetap digunakan. Sifat ASEAN yang *loose* dapat membuat Tiongkok dan Amerika Serikat merasa nyaman dan pada akhirnya akan membuka diri terhadap penyelesaian yang kooperatif.

Referensi

Agence France Presse. (12 Juli 2012). “ASEAN Struggles for Unity over South China Sea.” dalam Gary Collinson & Christopher B. Roberts. (2013). *The Role of ASEAN*. Acton: Australian National University.

Capie. D. (2005) ‘Southeast Asia and the United States’. dalam Evelyn Goh (ed). *Betwixt and Between: Southeast Asian Strategic Relations with the U.S. and China*. Singapore: Institute of Defence and Strategic Studies.

Ciorciari, John David. (2009). “The Balance of Great-Power Influence in Contemporary Southeast Asia”. *International Relations of the Asia-Pacific*. 9(1): 177.

Elias, Juanita & Peter Sutch. (2007). *The Basics International Relations*. New York: Routledge: p. 109.

Fravel. T. (2012). *South China Sea : What Issue and Whose Core Interest* . 6th Berlin Conference on Asia Security. Berlin: Konrad Adenaurer Siftung.

Gao. Z.. & Jia. B. B. (2013). “The nine-dash line in the South China Sea: history. status. and implications”. *American Journal of International Law*. 107(1). 98-124.

Goh, Evelyn. (2005). *Meeting the China Challenge: The U.S. in Southeast Asia Regional Security Strategies*. Washington: East West Center.

Goh, Evelyn. (2006) *Understanding “hedging” in Asia-Pacific Security*. Working paper yang diajukan pada Pacific Forum CSIS. Honolulu. Hawai pada tanggal 31 Agustus.

Goh, Evelyn. (2008). “Great Powers and Hierarchical Order in Southeast Asia: Analyzing Regional Security Strategies”. *International Security*. 32(3):144.

Goh, Evelyn. (2008). "Hierarchy and the role of the United States in the East Asian Security Order". *International Relations of the Asia-Pacific*. Vol. 8(3): 99.

<http://www.afri-ct.org/The-defence-diplomacy-main?lang=fr> diakses 5 September 2014.

Luhulima, C.P.F. (2011). *Dinamika Asia Tenggara menuju 2015*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Manurung. H. (2014). *Indonesia's Maritime Pivot and Joko Widodo (Jokowi) Transformational Leadership*. Available at SSRN 2510986.

Medeiros, Evan S.. (2006). "Strategic Hedging and the Future of Asia-Pacific Stability." *Washington Quarterly*. Vol 29(1): 8.

Motik Yusuf, Chandra (ed.). (2008). *Maritime Dimensions Of A New World Order*. dalam Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim. Jakarta: IND HILL CO.

Pattiradjawane, Rene L.. (2015). *South China Sea Disputes: Sovereignty and Indonesian Foreign Policy*. Singapore: RSIS.

Rajagopalan, Rajeswari Pillai. (2008). "*Military Diplomacy: The Need for India to Effectively Use In Its Conduct of Diplomacy*".

Sumakul, Willy F. (2014). Poros Maritim dan ISPS Code Di Indonesia. *QUARTERDECK*. Vol. 8(2): 9.

Supriyanto, Ristian Atriandi. (2012). *Indonesia's South China Sea Dilemma: Between Neutrality and Self Interest*.

T. Mahan, Alfred. (2014). *Discussion of the Elements of Sea Power and Geopolitics: An Introductory Reader*. New York: Cambridge.

Thayer, Carlyle A.. (2010). *The United States and Chinese Assertiveness in the South China Sea*.

Thucydide, Centre. (2003. 1 Januari). “AFRI 2002. Volume III – The “Defence Diplomacy”. Main Component of the Preventive Diplomacy. Toward a New Symbiosis Between Diplomacy and Defence.”

Wawancara dengan Laksda TNI (Purn) Robert Mangindaan. Ketua Forum Kajian Pertahanan dan Maritim (FKPM). 6 Agustus 2015.

Yasuhiro, Matsuda. (2006). “*An Essay on China’s Military Diplomatic: Examination of Intentions in Foreign Strategy*”.